

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si

Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

TUGAS & FUNGSI

- 1. Perda Nomor 5 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan**
- 2. Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan**

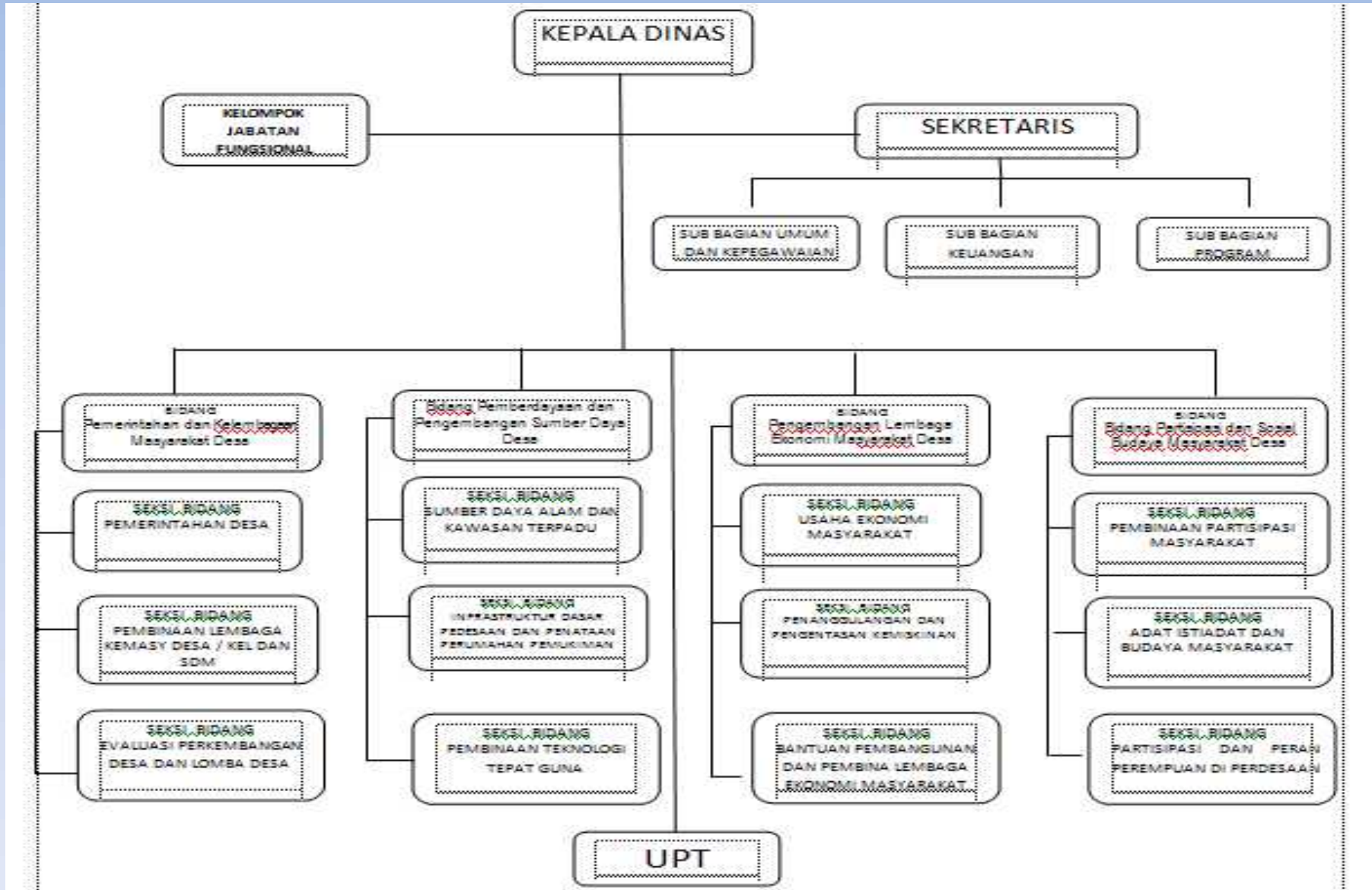
TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa, dan Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa.

FUNGSI

1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

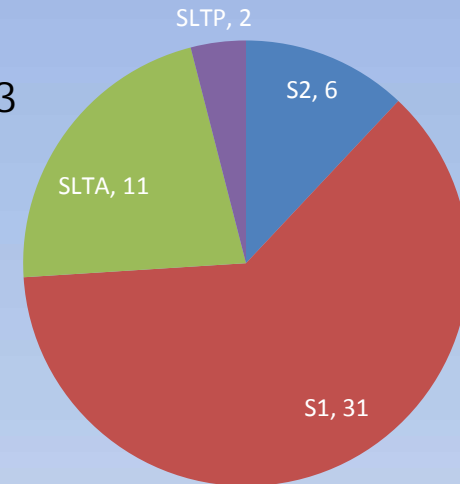


SUMBER DAYA MANUSIA

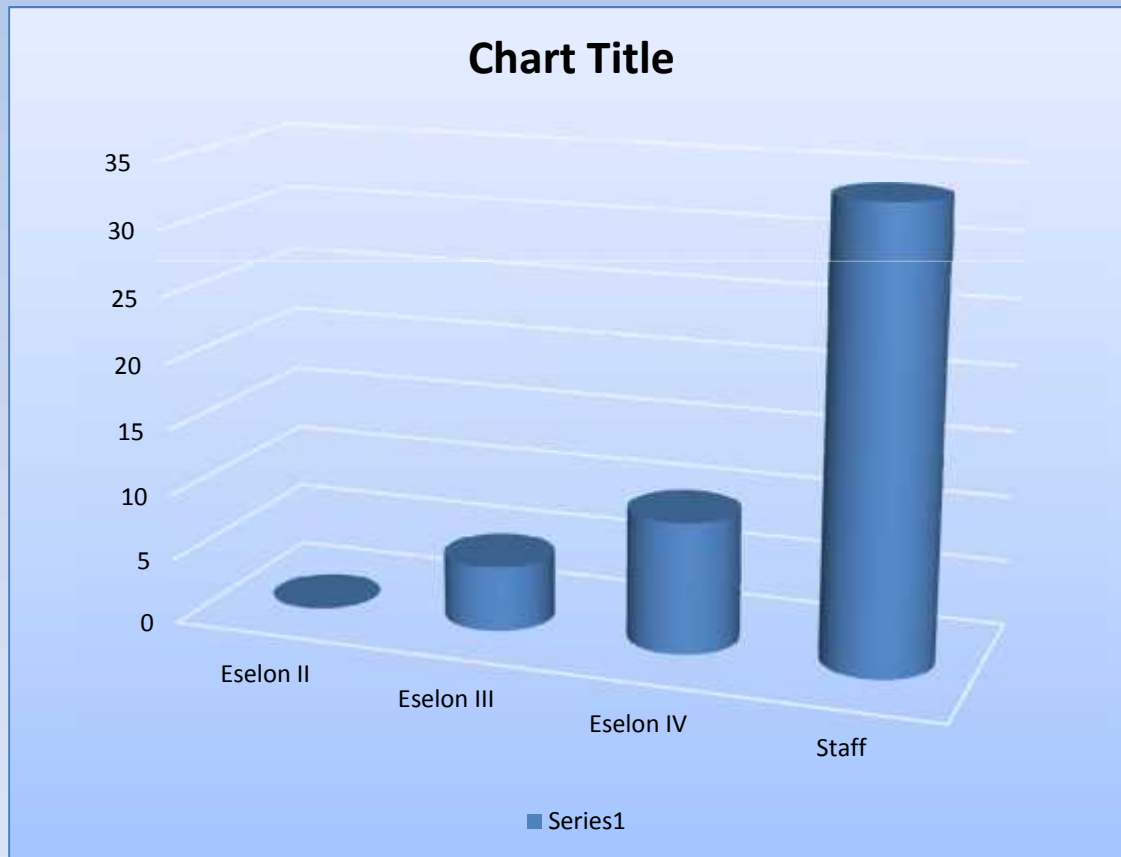
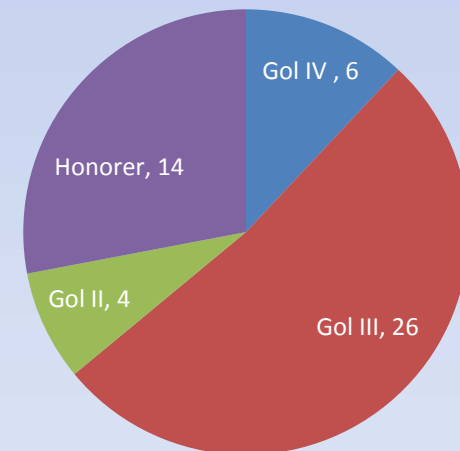
Jumlah pegawai 50 orang (17 pejabat struktural, 33 staf dan) terdiri dari :

- Laki-Laki : 36 orang
- Perempuan : 14 orang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



POTENSI WILAYAH ADMINISTRATIF DESA/KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN

Uraian	Potensi	Pemanfaatan	%
Jumlah Kecamatan	27 Kecamatan		
Jumlah Desa/Kelurahan	474 Desa/Kel.		
Jumlah Dusun	1432 Dusun		
Jumlah RW	2198 RW		
Jumlah RT	6884 RT		
Jumlah BPD	4052 orang		
Jumlah LPMD	474 LPMD	Kategori I (Baik); 70 LPM Kategori II (Sedang); 316 LPM Kategori III (Jelek); 88 LPM	
Jumlah PKK (Dasawisma)	17.282 PKK		
Jumlah Posyandu	1732 Kelompok		
Jumlah BUMDes	464 Lembaga		
Jumlah UPK	26 Kelompok		
Jumlah Pokmas	3107 Kelompok		
Jumlah UPKu	113 Kelompok		

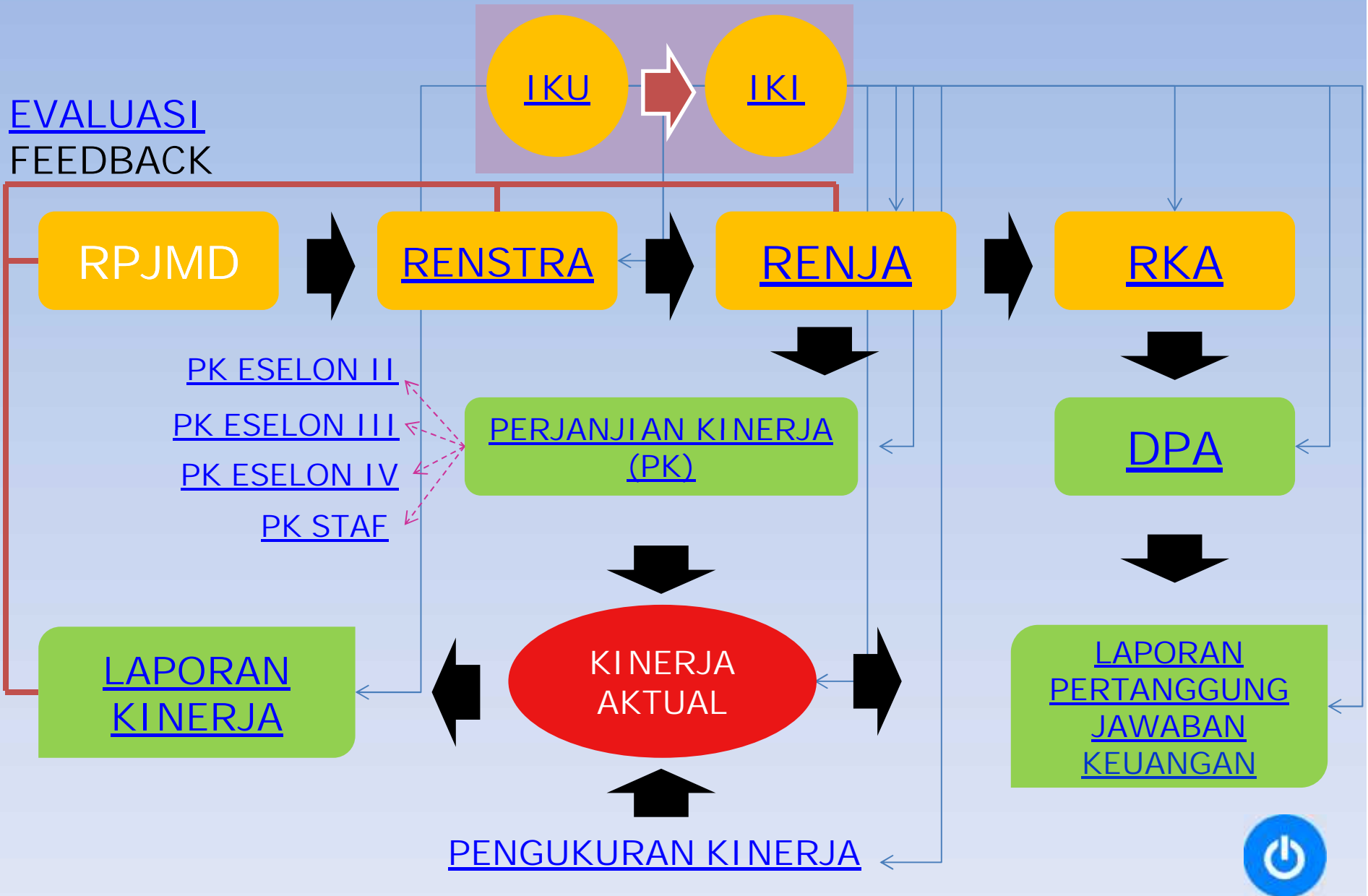
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 - 2021



INDIKATOR	FORMULASI	
% Jumlah Desa Cepat Berkembang	Jumlah Desa Cepat Berkembang	X 100%
	Jumlah Keseluruhan Desa di Kabupaten Lamongan	

2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.84%	11.69%	17.5%	23.4%	29.2%	30.7%

PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN



KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016 – 2021 DENGAN

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 - 2021

RPJMD TAHUN 2016 - 2021

VISI :

TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING

MISI 5 :

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
YANG TENTERAM DAN DAMAI DENGAN
MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

TUJUAN 6:

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG
AMAN, TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-
NILAI AGAMA, HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN

SASARAN :

MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT
DAN LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

INDIKATOR :

PROSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG

RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

VISI :

TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN
BERDAYA SAING

MISI :

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG
AMAN, TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-
NILAI AGAMA, HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN

TUJUAN :

MENINGKATNYA PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT
DAN LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN DESA

SASARAN :

1. MENINGKATNYA PERAN DAN LEMBAGA ORGANISASI
MASYARAKAT DESA YANG AKTIF
2. MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
3. MENINGKATNYA USAHA LEMBAGA EKONOMI
PERDESAAN
4. MENINGKATNYA KEPERDAYAAN DAN PENGUATAN
MASYARAKAT

KETERKAITAN SASARAN DAN INDIKATOR DALAM RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 - 2021

SASARAN RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

SASARAN :

1. Meningkatnya peran dan lembaga organisasi masyarakat desa yang aktif
2. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
1. Meningkatkan Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat Desa

INDIKATOR KINERJA RENSTRA TAHUN 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA:

1. Prosentase BPD Baik
2. Prosentase LPM baik
3. Prosentase PKK aktif
4. Prosentase Posyandu aktif
5. Prosentase HIPPAM aktif
6. Jumlah Desa E-GOV
7. Jumlah BUMDes yang terbentuk
8. Jumlah BUMDes yang Berkembang
9. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa
10. Jumlah Pasar Desa yang berkembang
11. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)
12. Jalan Poros Strategis Desa dalam kondisi Mantap
13. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
14. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
15. Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa
16. Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu (kembangmas dan jalin matra)

RENSTRA SKPD

DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SKPD
TAHUN 2016 – 2021



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Fomulasi Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa	1 Meningkatkan peran dan lembaga organisasi masyarakat desa yang aktif	1 Lembaga Masyarakat Desa				
		a Prosentase BPD baik	$\frac{\text{Jumlah BPD baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan BPD}} \times 100\%$	a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	a Penguatan SDM dan Kelembagaan BPD	
		b Prosentase LPM baik	$\frac{\text{Jumlah LPM baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan LPM}} \times 100\%$	b Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	b Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD)	
		c Prosentase PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan PKK}} \times 100\%$	c Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan di desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	c Penguatan SDM dan Kelembagaan perempuan di desa	
		d Prosentase Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Posyandu}} \times 100\%$	d Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan di desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	d Penguatan SDM dan Kelembagaan perempuan di desa	
	e Jumlah HIPPAM aktif	$\frac{\text{Jumlah HIPPAM Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan HIPPAM}} \times 100\%$	e Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	e Penguatan SDM dan Kelembagaan HIPPAM		
	2 Tata kelola Pemerintahan Desa	1 Tingkat Acceptabilitas / Perencanaan				
		a Prosentase Desa yang menggunakan elektronik Governen (E-Gov)	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menggunakan elektronik Governen (E-Gov)}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	a Pengembangan Sistem Administrasi Desa Berbasis Tehnologi Informatika	a Pengembangan Sistem Aplikasi Administrasi Desa	
	3 Meningkatkan Lembaga Ekonomi Perdesaan	1 Meningkatkan daya dukung kemampuan wira usaha masyarakat				
			a Prosentase BUMDes yang terbentuk	$\frac{\text{Jumlah terbentuknya BUMDes}}{\text{Jumlah keseluruhan BUMDes}} \times 100\%$	a Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	a Pendirian BUMDes
			b Prosentase Perkembangan BUMDes	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa}}{\text{Jumlah Keseluruhan BUMDES}} \times 100\%$	b Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan	b Peningkatan Peran BUMDes
			c Prosentase Pasar Desa yang berkembang	$\frac{\text{Jumlah Pasar Desa yang berkembang}}{\text{Jumlah keseluruhan Pasar Desa}} \times 100\%$	c Pengembangan dan Peningkatan layanan Pasar Desa	c Pendirian dan Pengembangan Pasar Desa

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Fomulasi Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		d Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa yang diadakan	d Pengembangan ilmu pengetahuan, kemampuan tehnik dan manajerial kelompok usaha di perdesaan	d Pelatihan SDM dalam aspek ilmu pengetahuan, tehnologi dan manajerial dalam kelomok usaha di perdesaan berbasis potensi lokal
		e Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (JP2K dan UEP-SP)	Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (JP2K dan UEP-SP) X 100% Jumlah keseluruhan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (JP2K dan UEP-SP)	e Pengembangan Peran Perempuan Perdesaan dalam Usaha Ekonomi	e Penguatan Peran Perempuan dalam kelompok usaha guna peningkatan pendapatan keluarga
	Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat	1 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat			
		a Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa yang diadakan	d Pengembangan ilmu pengetahuan, kemampuan tehnik dan manajerial kelompok usaha di perdesaan	d Pelatihan SDM dalam aspek ilmu pengetahuan, tehnologi dan manajerial dalam kelomok usaha di perdesaan berbasis potensi lokal
		2 Meningkatnya Adat dan Budaya Masyarakat di perdesaan			
		a Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	Jumlah Keseluruhan Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	a Menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong Dalam pembangunan desa	a Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
		b Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Jumlah Keseluruhan kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	b Peningkatan Peran kelompok budaya dan adat di perdesaan	b Pemberian Bantuan Kepada kelompok budaya dan adat di perdesaan
		3 Meningkatnya Paartispasi Masyarakat di perdesaan			
	a Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	Jumlah Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	a Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan swadaya	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	Fomulasi Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4 Pengurangan Beban Hidup Masyarakat Miskin di perdesaan			
		a % Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu (kembangmas dan jalin mata)	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin yang terbantu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Keluarga Miskin}} \times 100\%$	a Pengurangan Beban Hidup Keluarga Miskin	a Pemberian bantuan alat/peralatan dan modal usaha yang disesuaikan dengan kondisi keluarga miskin
		5 Penguatan Sarana Prasarana Desa (Infa Struktur)			
		a % Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Keseluruhan Jalan Poros Desa}} \times 100\%$	a Peningkatan Infa Struktur Desa	a Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk pembangunan Infa Struktur Desa

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) indikator Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Besaran	Indikator	Tahun Dasar (2015)		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil
Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan lembaga di dalam pembangunan desa	1 Meningkatkan peran dan lembaga organisasi masyarakat desa yang aktif	1 Lembaga Masyarakat Desa														
		a Jumlah LPM bak	$\frac{3}{474} \times 100\%$	0,63%	$\frac{6}{474} \times 100\%$	1,27%	$\frac{9}{474} \times 100\%$	1,90%	$\frac{11}{474} \times 100\%$	2,32%	$\frac{15}{474} \times 100\%$	3,16%	$\frac{18}{474} \times 100\%$	3,80%	$\frac{21}{474} \times 100\%$	4,43%
		b Jumlah LPM bak	$\frac{3}{474} \times 100\%$	0,63%	$\frac{6}{474} \times 100\%$	1,27%	$\frac{9}{474} \times 100\%$	1,90%	$\frac{11}{474} \times 100\%$	2,32%	$\frac{15}{474} \times 100\%$	3,16%	$\frac{18}{474} \times 100\%$	3,80%	$\frac{21}{474} \times 100\%$	4,43%
		c Jumlah PKK aktif	$\frac{376}{502} \times 100\%$	75,30%	$\frac{405}{502} \times 100\%$	80,68%	$\frac{452}{502} \times 100\%$	90,06%	$\frac{499}{502} \times 100\%$	91,43%	$\frac{488}{502} \times 100\%$	97,21%	$\frac{498}{502} \times 100\%$	99,20%	$\frac{502}{502} \times 100\%$	100,00%
		d Jumlah Posyandu aktif	$\frac{1351}{1740} \times 100\%$	78,49%	$\frac{1364}{1740} \times 100\%$	78,39%	$\frac{1396}{1740} \times 100\%$	80,24%	$\frac{1491}{1740} \times 100\%$	85,70%	$\frac{1467}{1740} \times 100\%$	84,31%	$\frac{1503}{1740} \times 100\%$	86,38%	$\frac{1540}{1740} \times 100\%$	88,51%
		e Jumlah HI/PAM aktif	$\frac{271}{462} \times 100\%$	58,66%	$\frac{285}{462} \times 100\%$	61,69%	$\frac{290}{462} \times 100\%$	62,77%	$\frac{295}{462} \times 100\%$	63,85%	$\frac{300}{462} \times 100\%$	64,94%	$\frac{305}{462} \times 100\%$	66,02%	$\frac{308}{462} \times 100\%$	67,10%
	2 Tata kelola Pemerintahan Desa	1 Tingkat Acceptance/Perencanaan														
		a % Jumlah Desa yang menggunakan eGonek Governance (e-Gov)	$\frac{0}{462} \times 100\%$	0,00%	$\frac{3}{462} \times 100\%$	0,65%	$\frac{6}{462} \times 100\%$	1,30%	$\frac{11}{462} \times 100\%$	2,38%	$\frac{14}{462} \times 100\%$	3,03%	$\frac{17}{462} \times 100\%$	3,68%	$\frac{20}{462} \times 100\%$	4,33%
	3 Meningkatkan Lembaga Ekonomi Perdesaan	1 Meningkatkan daya dukung kemampuan wira usaha masyarakat														
		a Jumlah BUMDes yang terbentuk	$\frac{145}{462} \times 100\%$	31,39%	$\frac{231}{462} \times 100\%$	50,00%	$\frac{291}{462} \times 100\%$	62,99%	$\frac{341}{462} \times 100\%$	73,81%	$\frac{388}{462} \times 100\%$	84,20%	$\frac{426}{462} \times 100\%$	92,21%	$\frac{462}{462} \times 100\%$	100,00%
		b % Prosentasi Perkembangan BUMDes	$\frac{2}{145} \times 100\%$	1,38%	$\frac{4}{145} \times 100\%$	2,76%	$\frac{6}{145} \times 100\%$	4,14%	$\frac{8}{145} \times 100\%$	5,52%	$\frac{10}{145} \times 100\%$	6,90%	$\frac{11}{145} \times 100\%$	7,59%	$\frac{14}{145} \times 100\%$	9,66%
		c % Jumlah Pasar Desa yang berkembang	$\frac{16}{105} \times 100\%$	15,24%	$\frac{31}{105} \times 100\%$	29,52%	$\frac{41}{105} \times 100\%$	39,05%	$\frac{50}{105} \times 100\%$	47,62%	$\frac{59}{105} \times 100\%$	56,19%	$\frac{68}{105} \times 100\%$	64,76%	$\frac{75}{105} \times 100\%$	71,43%
	d Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbiasa (UP2K dan UEPSP)	$\frac{462}{1356} \times 100\%$	33,33%	$\frac{559}{1356} \times 100\%$	40,86%	$\frac{636}{1356} \times 100\%$	46,90%	$\frac{693}{1356} \times 100\%$	50,74%	$\frac{770}{1356} \times 100\%$	56,86%	$\frac{847}{1356} \times 100\%$	62,50%	$\frac{924}{1356} \times 100\%$	68,15%	

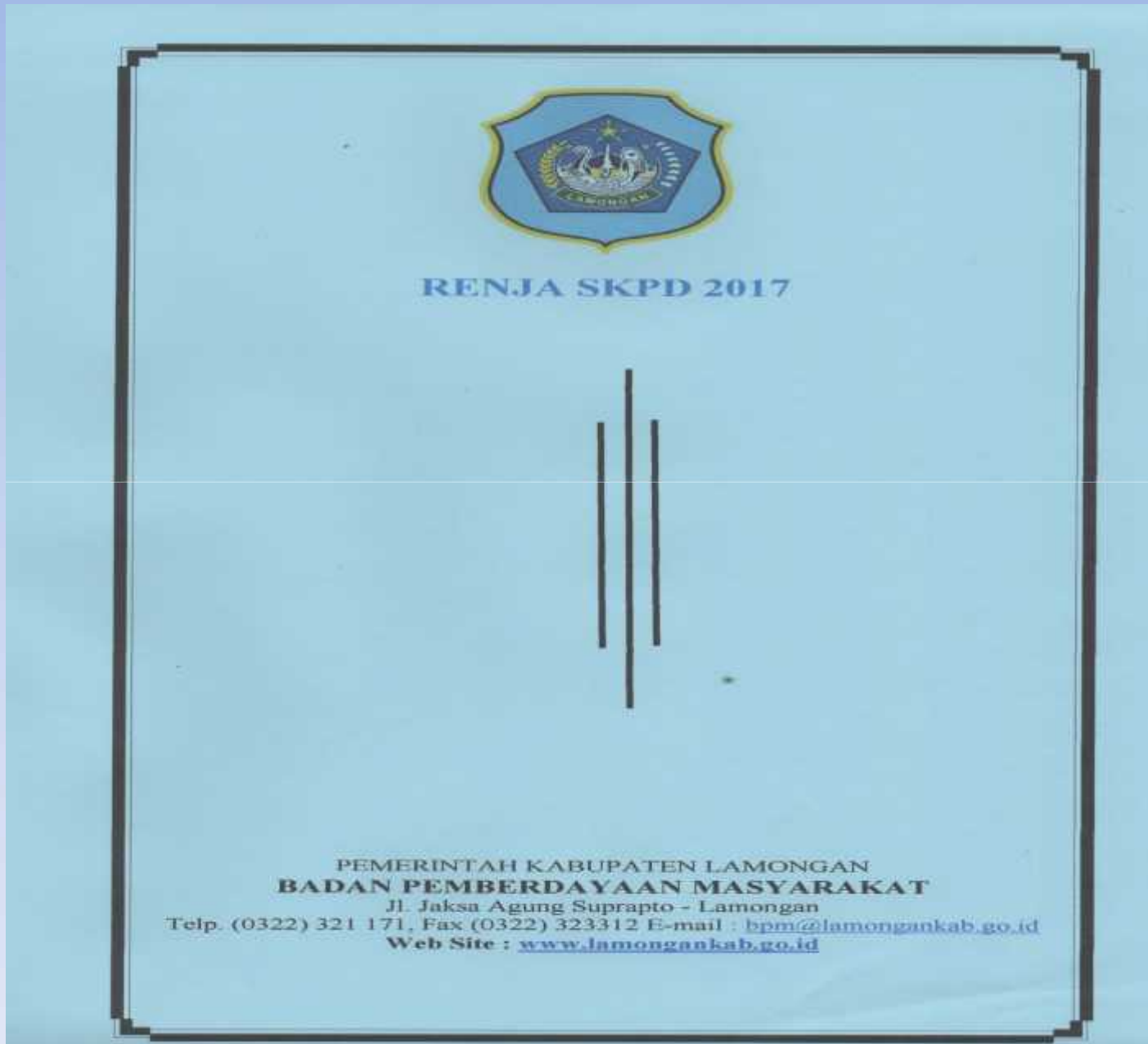
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

indikator Kinerja


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Besaran	Indikator	Tahun Dasar (2015)		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Perhitungan		Perhitungan		Perhitungan		Perhitungan		Perhitungan		Perhitungan		Perhitungan	
			Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil
4 Meningkatkan Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat	1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat														
		• Jumlah Peladikn Kebrampilan Usaha Masyarakat Desa	1		4		6		8		9		10		12	
	2	Meningkatnya Adat dan Budaya Masyarakat di perdesaan														
		• Jumlah Aktivitas Kegiatan Golong Rayong di perdesaan	27		54		81		108		135		162		189	
		• Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	2		4		6		8		9		10		12	
	3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di perdesaan														
		• Jumlah Nilai Kawadayaan dalam pembangunan desa	145.000.000,000		150.000.000,000		155.000.000,000		160.000.000,000		165.000.000,000		170.000.000,000		175.000.000,000	
	4	Pengurangan Beban Hidup Masyarakat Miskin di perdesaan														
		• % Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu (kembangmas dan jalin masra)	$\frac{1012}{130151} \times 100\%$	0,78%	$\frac{2130}{130151} \times 100\%$	1,64%	$\frac{2876}{130151} \times 100\%$	2,21%	$\frac{3662}{130151} \times 100\%$	2,82%	$\frac{5241}{130151} \times 100\%$	4,03%	$\frac{7075}{130151} \times 100\%$	5,44%	$\frac{8851}{130151} \times 100\%$	7,54%
	5	Penguatan Sarana Prasarana Desa (infra Struktur)														
• % Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap		$\frac{45800}{411429} \times 100\%$	10,85%	$\frac{66800}{411429} \times 100\%$	16,72%	$\frac{93800}{411429} \times 100\%$	22,80%	$\frac{118800}{411429} \times 100\%$	28,87%	$\frac{143800}{411429} \times 100\%$	34,95%	$\frac{168800}{411429} \times 100\%$	41,03%	$\frac{193800}{411429} \times 100\%$	47,10%	

RENCANA KINERJA



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 1.02.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengguna Anggaran :
Klasifikasi Anggaran :
a. Nama : Drs. MOEL NALIKAN, MM
b. NIP : 19600703 198911 1 001
c. Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Nama Formuler
RKA - SKPD	Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1	Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1.1	Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Ditinjau Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Ditinjau Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1	Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Ditinjau Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1	Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Pembinaan Daerah
RKA - SKPD 3.2	Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Pembinaan Daerah



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)

1.02.07.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Code	Nama Formulasi
DPA - SKPD	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 3.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pembayaan Daerah
DPA - SKPD 3.2	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Pembayaan Daerah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON II – Pjt KEPALA DINAS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHURNIL YAGIN S.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : FADELI, SH, MM
Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang dikehendaki serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2017

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



FADELI, SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN



KHURNIL YAGIN, S.Si
Pdt. Drs
NIP. 1957524-198002-1 004



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

SKPD : 3840 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Target Pembangunan Desa	1.1 Meningkatkan Daya Cipta Berkeadilan	11.89%

Jumlah Anggaran : Rp 4.717.744,300

Program dan Kegiatan :

1. Program Pembudayaan Four Value Karakter Anak Terpadu Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan	Rp	200.000.000
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan	Rp	281.232.200
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam) kegiatan	Rp	281.280.000
4. Program Peningkatan Kualitas Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan	Rp	54.800.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan	Rp	45.000.000
6. Program Peningkatan Keterbacaan Masyarakat Pelayanan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan	Rp	-30.000.000
7. Program Pengendalian (Lingkungan Ekonomi Pelayanan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan	Rp	700.000.000
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan	Rp	875.000.000
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan	Rp	240.000.000
10. Program Peningkatan Renc. Pembangunan di Pedesaan, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan	Rp	1.100.000.000
11. Program Pengembangan Desa (1) Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan	Rp	75.000.000

Lamongan, Januari 2017

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



FADELI, SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN



KHURNIL YAGIN, S.Si
Pdt. Drs
NIP. 1957524-198002-1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III – KABID

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DESA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021:

Nama : **DR. POEDJANTO, MM**
 Jabatan : **Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa**

Selanjutnya disebut pihak pertama
 Nama : **KHUSNUL YAQDI, S.Si**
 Jabatan : **PI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

Selaku pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, oleh karena mencapai target kinerja yang menantang seperti yang telah di tuliskan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil inisiatif yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2017

PIHAK KEDUA
 PI Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

PIHAK PERTAMA
 Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa

KHUSNUL YAQDI, S.Si
 NIP. 196795119830211001

DR. POEDJANTO, MM
 NIP. 195409241989111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah Nilai Indeks Pembangunan Manusia Jumlah Indeks Desa Dasar Jumlah Indeks Desa Jumlah Indeks Desa Jumlah Indeks Desa	0
2	Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Berada pada Desa Berada pada Desa Berada pada	100%

Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,00

No	Revisi	Anggaran	Ket.
1	Revisi Anggaran	Rp. 100.000.000,00	
2	Revisi Anggaran	Rp. 100.000.000,00	
3	Revisi Anggaran	Rp. 100.000.000,00	
4	Revisi Anggaran	Rp. 100.000.000,00	

PI Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
KHUSNUL YAQDI, S.Si
 NIP. 196795119830211001

Lamongan, Januari 2017
 Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
DR. POEDJANTO, MM
 NIP. 195409241989111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III – KABID

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PARTISIPASI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PARTISIPASI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA**

Untuk rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berada di bawah ini :

Nama : Dra. ENI M. TMAINAH

Jabatan : Kabid Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHUSNUL YAQIN, S.Si

Jabatan : PA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

Selaka atas ini pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan tugas kerjanya yang seluas-luasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penilaian kinerja yang akan datang.

PIHAK KEDUA
Pa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan

KHUSNUL YAQIN, S.Si
NIP. 196701241993221001

Lamongan, Januari 2017
PIHAK PERTAMA
Kabid Partisipasi dan Sosial Budaya
Masyarakat Desa

Dra. ENI M. TMAINAH
NIP. 196309041993221001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PARTISIPASI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

No	Kecamatan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Percepatan Terwujudnya Desa	... (text partially obscured)	100%
2	Meningkatkan Kualitas Desa	... (text partially obscured)	85%
3	Meningkatkan Kualitas Desa	... (text partially obscured)	85%

Kumulatif Anggaran : Rp. 1.125.000.000,00

No	Program	Anggaran	Kol
1	Program Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Rp. 9.000.000,00	
2	Program Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Rp. 1.116.000.000,00	

Pa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan

KHUSNUL YAQIN, S.Si
NIP. 196701241993221001

Lamongan, Januari 2017
Kabid Partisipasi dan Sosial Budaya
Masyarakat Desa

Dra. ENI M. TMAINAH
NIP. 196309041993221001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III – KABID

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA
DINAS PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bermula dengan di bawah ini:

Nama : HARI SURYANTORO PUTRO, S.Sos, M.P.
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
Selanjutnya disahai pihak pertama

Nama : KHUSNUL YAQIN, S.Si
Jabatan : SEKELPA DINAS PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN

Selain atas pemicu pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebagaimana tertera lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kedua.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2017

PIHAK KEDUA
The Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan

PIHAK PERTAMA
Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan Desa





KHUSNUL YAQIN, S.Si
NIP. 136725241923021104


HARI SURYANTORO PUTRO, S.Sos, M.P.
NIP. 15731871989021101


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tariff
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indikator Kinerja Kualitas Pelayanan	100%
2	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	Indikator Kinerja Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	100%
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Indikator Kinerja Transparansi dan Akuntabilitas	100%
4	Meningkatkan Kualitas Monev	Indikator Kinerja Kualitas Monev	0%

Jumlah Anggaran : Rp. 001.000.000,00

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Rp. 100.000,00	
2	Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran	Rp. 800.000,00	
3	Program Peningkatan Kualitas Monev	Rp. 100.000,00	
4	Program Peningkatan Kualitas Monev	Rp. 0,00	


KHUSNUL YAQIN, S.Si
 NIP. 136725241923021104


HARI SURYANTORO PUTRO, S.Sos, M.P.
 NIP. 15731871989021101

Lamongan, Januari 2017
Kabid Pemerintahan dan Kelembagaan
Desa Kabupaten Lamongan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III – KABID

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KABID PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT DESA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARWAH YULIOMO, SSI, MM

Jabatan : Kabid Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHUSNUL YAQIN, S.Si

Jabatan : PI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LAMONGAN

Selaku pihak kedua, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di lampirkan dalam dokumen perencanaan, keberfektifan dan keagresifan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan sanksi.

Lamongan, Januari 2017

PIHAK KEDUA
PI Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Lamongan

KHUSNUL YAQIN, S.Si
N.P. 1947012119901021001

PIHAK PERTAMA
Kabid Pengembangan Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa

HARWAH YULIOMO, SSI, MM
N.P. 19750102196621001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	1. Peningkatan Perencanaan Desa	1. Jumlah APBD Desa 2. Jumlah Desa yang terdapat 3. Jumlah Desa yang terdapat 4. Jumlah Desa yang terdapat	82,17% 80,16% 4,05% 0,21%
2	2. Pengembangan Program dan Kegiatan Desa	1. Jumlah Desa yang terdapat 2. Jumlah Desa yang terdapat 3. Jumlah Desa yang terdapat	82,17% 80,16% 4,05%
3	3. Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	1. Jumlah Desa yang terdapat 2. Jumlah Desa yang terdapat 3. Jumlah Desa yang terdapat	82,17% 80,16% 4,05%

Kemungkinan Anggaran : Rp 573.000.000,00

No	Program	Anggaran	Saldo
1	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Desa	Rp 573.000.000,00	0,00
2	2. Program Peningkatan dan Pengembangan Desa	Rp 573.000.000,00	0,00
3	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Desa	Rp 573.000.000,00	0,00
4	4. Program Peningkatan dan Pengembangan Desa	Rp 573.000.000,00	0,00

PI Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

KHUSNUL YAQIN, S.Si
N.P. 1947012119901021001

Lamongan, Januari 2017
Kabid Pengembangan Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa

HARWAH YULIOMO, SSI, MM
N.P. 19750102196621001



TERIMA KASIH